

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World* yang dirilis *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2022 menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama pada rata-rata jumlah penduduk kurang gizi di Asia Tenggara pada tahun 2019 hingga 2021. Jumlah penduduk kurang gizi di Indonesia mencapai angka 17,7 juta orang atau 6,5% dari populasi nasional. Fakta ini menjadi sangat krusial bagi pemerintah Indonesia dan harus ditanggapi secara serius. Lebih jauh mengenai pemenuhan gizi, salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah *stunting*.

Menurut *World Health Organization* (2015) *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Selanjutnya, mengacu dari Kemenkes (2022), *stunting* atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak ditandai dengan panjang atau tinggi yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. *Stunting* pada anak dapat terjadi jika status gizi pada anak tersebut sangat kurang dalam jangka waktu yang lama. Status gizi *stunting* atau yang sering disebut dengan balita pendek didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U. Lebih jauh, indeks tersebut menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan balita berdasarkan usianya. Indeks ini dimuat dalam Standar Antropometri Anak.

Mengacu pada standar WHO, suatu daerah dapat dikatakan baik jika prevalensi balita *stunting* >5%. Ironisnya, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia pada tahun 2022, prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 21,6%. Dengan kata lain, Indonesia tetap tergolong sebagai negara dengan prevalensi *stunting* tinggi. Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah dalam menurunkan angka agar bisa mencapai target capaian RPJMN pada akhir tahun 2024 nanti. Dalam rangka mewujudkan target capaian RPJMN tentu saja diperlukan kesinergitasan dan kerja sama yang mumpuni dari semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan monitoring pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi yang dilaksanakan oleh Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, rata-rata persentase kasus *stunting* di Indonesia mencapai 6,1%. Selanjutnya, beberapa provinsi di Pulau Jawa masih melampaui rata-rata nasional tersebut. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki prevalensi *stunting* cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai 4,7%. Prevalensi *stunting* di Jawa Tengah mencapai 8,6%. Sejalan dengan adanya fakta tersebut, prevalensi *stunting* yang tinggi menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menurunkan prevalensi angka *stunting*.

Gambar 1 Data Balita Stunting Kab/Kota Di Jawa Tengah Berdasarkan E-PPGBM 2023



*Sumber: Diolah penulis, Laporan Percepatan Penurunan Stunting
Provinsi Jawa Tengah 2023*

Berdasarkan Laporan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Tengah, maka dapat dilihat bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki tingkat *stunting* tertinggi di Jawa Tengah dengan angka mencapai 13,9%. Permasalahan ini menjadi penting dikarenakan angka yang tercapai melampaui angka capaian Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 8,6%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Wonosobo belum bisa menyelesaikan permasalahan mengenai *stunting*.

Gambar 2 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	CAPAIAN					TARGET	% Realisasi Capaian 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2021	Status Capaian Akhir RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun) (%)	16,85	11,14	19,2	9,69	9,31	11,49	15	76,60	Tidak Tercapai

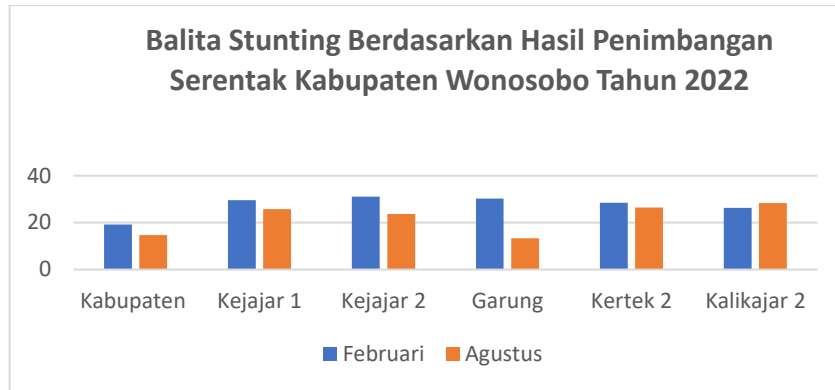
Sumber: RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026

Selain dari perbandingan pada gambar 1, data RPJMD menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menurunkan prevalensi *stunting* tidak mencapai target. Hal ini dibuktikan dengan realisasi capaian 2020 terhadap target akhir RPJMD 2021 yang hanya mencapai 76,60%. *Stunting* juga menjadi isu permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya. Isu permasalahan *stunting* berlanjut hingga tahun 2021. Adanya keberlanjutan ini juga menyebabkan *stunting* menjadi isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026. Lebih jauh, Kabupaten Wonosobo juga menjadi prioritas penanganan *stunting* nasional. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas untuk intervensi *stunting*.

Intervensi *stunting* merupakan tugas bersama yang membutuhkan kontribusi pemerintah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo, pihak swasta, kader posyandu, bidan desa, Puskesmas, serta masyarakat yang juga mencakup ibu hamil. Intervensi *stunting* membutuhkan sinergi dan bekerja sama agar penurunan angka *stunting* bisa dilaksanakan secara maksimal. Tidak hanya itu, kerja sama lintas sektor juga perlu dilaksanakan dalam rangka mengatasi isu strategis Kabupaten Wonosobo ini.

Gambar 3 Balita Stunting Berdasarkan Hasil Penimbangan Serentak

Kabupaten Wonosobo Tahun 2022



Sumber: diolah peneliti, e-PPGBM

Berdasarkan Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, dapat dilihat bahwa prevalensi *stunting* di Kecamatan Kejajar menempati posisi prevalensi *stunting* tertinggi di Kabupaten Wonosobo hingga mencapai angka 31,1% dan 29,6%. Angka tersebut melampaui prevalensi *stunting* nasional yang hanya mencapai 21,6% pada tahun 2022. Permasalahan ini sangat krusial sehingga diperlukan adanya upaya dalam mengentaskan *stunting*.

Hingga saat ini, kerja sama lintas sektor dalam mengurangi prevalensi angka *stunting* di Kecamatan Kejajar telah dilaksanakan. Berbagai program kerja diselenggarakan dalam mewujudkan *Zero Stunting 2024*. Salah satunya adalah DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. DASHAT merupakan pusat gizi dan pelayanan pada baduta *stunting*, ibu menyusui, dan ibu hamil KEK. Program DASHAT merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini telah

direalisasikan di berbagai desa maupun kecamatan di seluruh Indonesia termasuk di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar.

Program DASHAT dilatarbelakangi dengan adanya fakta bahwa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah saat yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting*. Program DASHAT dilaksanakan selama 90 hari berturut-turut dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan makanan di dapur yang sudah disiapkan sesuai ketentuan, sehingga proses pengantaran dan pemantauan sasaran *stunting* bisa dilakukan dengan maksimal. Lebih jauh, Program DASHAT juga dapat menjadi sarana edukasi pangan dan gizi dan dapat bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Program DASHAT *launching* di Wonosobo pada 30 September 2021 dan dilaksanakan di Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten. Desa Surengede merupakan *pilot project* pelaksanaan DASHAT di Kabupaten Wonosobo. Dilansir melalui aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), Desa Surengede memiliki prevalensi *stunting* yang tinggi dengan angka mencapai 30,7%. Angka tersebut sangat besar jika dibandingkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo yang hanya mencapai 13,9%. Maka dari itu, Program DASHAT dilaksanakan dalam mengentaskan *stunting* dan mewujudkan *zero stunting* 2024.

Tabel 1 Jumlah Baduta/Balita Stunting & Ibu Hamil KEK Desa Surengede Tahun 2021

Jumlah Balita Stunting	73
Jumlah Baduta Stunting	15
Jumlah Baduta Stunting Baru Lahir	2

Jumlah Baduta Stunting Rujukan Posyandu	3
Jumlah Ibu Hamil KEK	9
Jumlah Ibu Hamil di Tahun 2021	33
Jumlah Balita di Tahun 2021	283

Sumber: Kanal YouTube Desa Surengede

Penetapan Desa Surengede sebagai *pilot project* dari pelaksanaan Program DASHAT di Kabupaten Wonosobo bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan data di atas, terdapat 93 baduta dan balita *stunting* di Desa Surengede. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prevalensi *stunting* di Desa Surengede yang masih melambung tinggi. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo No 440/37/2021 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, Desa Surengede termasuk dalam salah satu dari 15 desa lokus *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya itu, Desa Surengede juga menjadi salah satu dari 4 desa lokus *stunting* di wilayah Kecamatan Kejajar.

Tabel 2 Stakeholder Dalam Program DASHAT di Desa Surengede

Sektor Terlibat	Pihak	Fungsi
Sektor Pemerintah	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Regulator & Fasilitator
	DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo	Fasilitator dan melaksanakan edukasi dan pembinaan teknis
	Puskesmas Kejajar I	Pendampingan layanan kesehatan
Sektor Swasta	TANGKAS (Aqua & LPTP Surakarta)	Pendampingan kader terkait pelaksanaan
		Pelaksanaan konsultasi
Masyarakat	Tim penggerak PKK	Pelaksanaan produksi, pengemasan, distribusi terkait Program DASHAT
	Kader penggerak desa	

Sumber: Buku Pegangan DASHAT BKKBN 2022

Program DASHAT memerlukan sinergi dari semua sektor karena program ini merupakan program multisector. Dalam keberjalanannya, program ini didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Wonosobo, Puskesmas 1 Kecamatan Kejajar sebagai pihak pemerintah. Selanjutnya, pada pihak masyarakat terdapat Penyuluh Lapangan KB, kader penggerak desa, serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selanjutnya, dalam pihak swasta terdapat kolaborasi antara Aqua Wonosobo dengan menggandeng LPTP Surakarta sebagai mitra dan membentuk CSR bernama TANGKAS (Tanggap Gizi dan Kesehatan Anak Stunting). Di dalam pelaksanaannya, program DASHAT memerlukan pendanaan yang besar dikarenakan program ini akan dijalankan selama 90 hari.

Gambar 4 Kegiatan DASHAT di Desa Surengede Kecamatan Kejajar



Sumber: kampungkb.bkkbn.go.id

Berdasarkan *website* BKKBN, pelaksanaan DASHAT di Desa Surengede selalu dihadiri oleh bidan desa, TPK Desa Surengede, dan pihak TANGKAS yang mencakup Aqua Wonosobo dan LPTP Surakarta. Kegiatan DASHAT diawali dengan pembuatan makanan di dapur yang sudah disiapkan sesuai ketentuan hingga

proses pengantaran ke rumah-rumah balita *stunting* sehingga makanan dapat dipastikan sampai ke rumah balita sasaran Program DASHAT. Lebih jauh, semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Gambar 5 Pelaksanaan Program DASHAT di Desa Surengede



Sumber: Akun Facebook Susi Dwi Rakhmawati

Walaupun menjadi *pilot project* di tahun 2021, pelaksanaan Program DASHAT di Desa Surengede tidak mengalami keberlanjutan di tahun-tahun setelahnya. Mengacu pada Buku Pegangan Program DASHAT Untuk Mahasiswa Peduli *Stunting* yang diterbitkan oleh BKKBN pada tahun 2022, keberlanjutan menjadi instrument penting dalam penyelenggaraan Program DASHAT di desa sasaran. Pelaksanaan Program DASHAT di Desa Surengede hanya dilaksanakan di tahun 2021. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Desa Surengede hanya menyelenggarakan Program DASHAT sebanyak satu kali periode saja. Permasalahan ini mencerminkan komitmen para *stakeholder* dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede mengingat pada tahun 2022 prevalensi *stunting* di

Kecamatan Kejajar masih melambung tinggi. Berdasarkan hasil penimbangan serentak Kabupaten Wonosobo pada Agustus 2022 yang dihimpun dalam ePPGBM, prevalensi *stunting* di Desa Surengede masih mencapai 30,7%.

Tabel 3 Lokasi Program DASHAT di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2022

Tahun 2021	Tahun 2022
Desa Surengede	Desa Slukatan
	Desa Pagerejo
	Desa Kapencar
	Desa Tieng
	Desa Tambi
	Desa Tanjunganom
	Desa Serang

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo

Selain permasalahan mengenai ketidakberlanjutan Program DASHAT di Desa Surengede, Program DASHAT baru dijalankan di beberapa desa pilihan saja. Dari total 236 desa yang ada di Wonosobo, hanya ada 7 desa yang menjadi lokus program DASHAT di tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua balita gizi buruk atau *stunting* di Kabupaten Wonosobo mendapatkan perlakuan yang sama. Lebih lanjut, dalam Live *YouTube* oleh WEBTV Wonosobo, Dyah Sulistyowati sebagai Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Wonosobo menyebutkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan program DASHAT adalah anggaran dan biaya. Pelaksanaan program ini tentu saja membutuhkan dana yang besar karena program ini akan berjalan selama 90 hari berturut-turut. Hal tersebut juga menjadi alasan di balik belum meratanya pelaksanaan program DASHAT.

Pelaksanaan program DASHAT tentunya membutuhkan komitmen yang besar dari semua pihak yang terlibat. Komitmen tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede maupun di Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten Wonosobo telah menyelenggarakan berbagai program dalam rangka menurunkan prevalensi angka *stunting* di Kabupaten Wonosobo untuk mencapai *Zero Stunting 2024*. Hal tersebut mengindikasikan adanya langkah baik dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal. Namun begitu, semua keberjalanan Program DASHAT masih menemui hambatan. Sebagian dari program-program terkait, belum ada keberlanjutan dan monitoringnya. Pelaksanaan program DASHAT tentunya membutuhkan komitmen yang besar dari semua pihak yang terlibat. Komitmen tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede maupun di Kabupaten Wonosobo. Namun begitu, kurangnya komunikasi antar-sektor menjadi rintangan yang bisa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan *Zero Stunting 2024*. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai sinergitas dan kolaborasi antar *stakeholder* dalam rangka penanganan *stunting* di Kabupaten Wonosobo. Maka dari itu, penulis mengambil judul ***Commitment to The Process dalam Program DASHAT di Desa Surengede Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance.***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Adanya *gap* antara target capaian dengan realisasi capaian akhir RPJMD mengenai prevalensi *stunting* di Wonosobo. Adanya *gap* tersebut menyebabkan status capaian akhir RPJMD mengenai prevalensi *stunting* di Kabupaten Wonosobo belum tercapai. Ketidaktercapaian status akhir dikarenakan pelaksanaan *money* Program DASHAT yang kurang sempurna.
- 2) Komitmen DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo yang belum maksimal ditandai dengan pelaksanaan program “DASHAT” di Kabupaten Wonosobo yang belum bisa diselenggarakan di seluruh kecamatan/desa di Wonosobo. Adanya permasalahan tersebut menyebabkan manfaat program belum bisa dirasakan oleh *baduta* yang mengalami *stunting*.
- 3) Komitmen *stakeholder* yang terlibat Program DASHAT yang belum maksimal ditandai dengan ketidakberlanjutan Program DASHAT di Desa Surengede

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis di atas, rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, yaitu:

- 1) Bagaimana *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang membentuk *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penulisan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*.
2. Mengetahui faktor-faktor yang membentuk *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis yang dirincikan sebagai berikut:

- a) Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak terkait topik penelitian, diantaranya:

- 1) Sebagai referensi dan pedoman dalam pengembangan program lain yang berkaitan dengan *stunting* pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo.
- 2) Sebagai masukan dan saran untuk Pemerintah Kabupaten Wonosobo, DPPKBPPPA, dan pihak swasta mengenai proses kerja sama multisector utamanya pada pengentasan *stunting* di Kabupaten Wonosobo
- 3) Sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program DASHAT Kabupaten Wonosobo
- 4) Sebagai pedoman pemecahan masalah kaitannya dengan *collaborative governance* dalam program pengentasan *stunting*.

b) Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan perkembangan akademis, diantaranya

- 1) Sebagai pedoman perkembangan ilmu pengetahuan mengenai proses *collaborative governance* utamanya dalam program pengentasan *stunting*.

- 2) Sebagai pedoman dan acuan bagi peneliti lain dalam meneliti program pengentasan *stunting* yang ada di Kabupaten Wonosobo

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah elemen pendukung dalam sebuah penelitian karena berfungsi sebagai landasan untuk menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang dikaji. Menurut Arikunto (2006: 107), kerangka teoritis merupakan suatu wadah yang menjelaskan variabel atau isu utama yang terdapat dalam penelitian. Teori-teori yang disajikan dalam kerangka ini menjadi referensi utama dalam analisis dan pembahasan lebih lanjut. Selanjutnya, dalam kerangka teoritis akan dirincikan lebih lanjut ke dalam table penelitian terdahulu.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang telah ditemukan oleh penulis dirincikan pada table berikut.

Tabel 4 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Qori, dkk. (2023). Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan. <i>Jurnal Administrasi Publik dan Sosial</i> , 4(02).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses <i>Collaborative governance</i> dalam penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai tupoksi tugas yang menyebabkan kolaborasi belum bisa terlaksana secara maksimal. Sehingga, angka <i>stunting</i> di beberapa daerah di Kabupaten Bintan masih tinggi, • Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance secara keseluruhan dan hanya mengkaji mengenai proses collaborative governance yang ada di Kabupaten Bintan dalam mengentaskan prevalensi stunting.
2.	Afrida, Amirul, & Kristyan. (2024). <i>Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Sidoarjo</i> , 2(1).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> dalam pencegahan <i>stunting</i> di Kabupaten Sidoarjo telah memberikan dampak positif yang dibuktikan dengan pelaksanaan 5 indikator <i>collaborative governance</i> yaitu <i>face-to-face dialogue</i>, <i>trust building</i>, <i>commitment to the process</i>, <i>shared understanding</i>, dan <i>intermediate outcomes</i> yang sudah dilaksanakan secara maksimal. • Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance secara keseluruhan. Penelitian ini belum mengkaji faktor-faktor lain dari proses collaborative governance yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan stunting. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai indikator-indikator

			yang ada dalam collaborative governance seperti kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, serta proses kolaborasi. Penjelasan mengenai proses collaborative governance serta indikator-indikator yang terkait telah menjelaskan collaborative governance dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sidoarjo.
3.	Salsabila & Slamet Santoso. (2023). <i>Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang</i> .	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>collaborative governance</i> berperan dalam menangani stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Koordinasi, distribusi, dan pengelolaan bantuan dilakukan dengan baik oleh pentahelix (pemerintah, perusahaan, akademisi, media, dan masyarakat). Salah satu solusi yang dihasilkan adalah pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku positif. • Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dengan menekankan kolaborasi secara pentahelix Dimana terdapat lima actor yang berkontribusi dalam penanganan stunting. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji collaborative secara keseluruhan serta menggunakan 4 indikator collaborative governance yaitu kondisi awal, desainkelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif.
4.	Febriana & Diana. (2023). Penanggulangan Stunting Dalam Perspektif Collaborative Governance. <i>Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis</i> , 4(2).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkab bahwa collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan. Namun, dalam proses <i>collaborative governance</i> masih menemui hambatan seperti kurangnya dialog tatap muka. Namun begitu, hasil dari penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo sangat memuaskan. • Penelitian ini membahas mengenai 4 indikator collaborative governance beserta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Probolinggo. Tidak hanya itu, penelitian ini juga

			menggunakan matriks power versus interest grids dalam mengkaji mengenai peranan masing-masing pemangku kepentingan yang ada.
5.	Putri & Herbasuki, (2021). <i>Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Stunting di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun <i>collaborative governance</i> dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Desa Kalirandu telah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan seperti minimnya partisipasi dari kader, rendahnya komitmen dari kepala desa, dan permasalahan mengenai <i>upload data</i> stunting. • Penelitian ini membahas mengenai proses collaborative governance di Desa Kalirandu dalam penanggulangan stunting. Selain mengkaji mengenai proses collaborative governance, penelitian ini juga membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam proses collaborative governance.
6.	Sukanti & Nur. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman. <i>Jurnal Caraka Prabu</i> , 5(01).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Kabupaten Sleman yang diukur melalui keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama sudah cukup baik. Namun, beberapa indikator belum optimal, seperti ketiadaan forum komunikasi khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan kurangnya peran swasta. Namun begitu, prevalensi <i>stunting</i> bisa berkurang. • Penelitian ini mengkaji mengenai model collaborative governance, peran setiap <i>stakeholder</i>, dan desain kelembagaan dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Selain itu, penelitian ini juga meneliti mengenai pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya.
7.	Rusmawan, dkk. (2022). Proses Collaborative Governance Dalam	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> dalam inovasi pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten

	Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital (Studi di Kabupaten Banyumas)		Banyumas tersebut sudah berjalan dengan baik, dilihat adanya 5 indikator <i>collaborative governance</i> yaitu <i>face-to-face dialogue</i>, <i>trust building</i>, <i>commitment to the process</i>, <i>shared understanding</i>, dan <i>intermediate outcomes</i> yang sudah dilaksanakan secara maksimal • Penelitian ini mengkaji mengenai proses collaborative governance yang dilakukan actor-aktor terkait dalam pengelolaan sampah berbasis digital di Kabupaten Banyumas.
8.	Afandi, dkk. (2023). Collaborative Governance in a Mandated Setting: Shifting Collaboration in Stunting Interventions at Local Level. <i>Development Studies Research</i> , 10(1).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengentasan <i>stunting</i> di Jawa Barat telah dilaksanakan, namun dengan partisipasi terbatas dari aktor non-pemerintah. Hal ini terjadi karena lembaga pemerintah tetap menjadi pemilik utama proses tersebut, sementara aktor non-pemerintah tidak sepenuhnya terlibat. Akibatnya, kolaborasi dalam intervensi <i>stunting</i> menjadi hanya program pemerintah, bukan proses yang dimiliki bersama. • Penelitian ini mengkaji mengenai collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat dalam mengetaskan <i>stunting</i>. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji collaborative governance dalam perspektif <i>policy-mandated setting</i>
9.	Zuhri, dkk. (2023). The Role of Actors in Accelerating Stunting Reduction in Indonesia: A Pentaholix Perspective. <i>Revista de Gestão Social e Ambiental</i> , 18(4). 1-10.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Bekasi sudah efektif. Penurunan ini terjadi karena keterlibatan pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis saling melengkapi, mendukung, dan menyempurnakan satu sama lain. Pola kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan bisnis secara konkret mengurangi dan mengendalikan <i>stunting</i> di beberapa kecamatan dan desa di Bekasi. Namun, partisipasi masyarakat belum optimal dan belum ada kolaborasi kegiatan dengan

			aktor lainnya. Kekurangan lainnya adalah peran media sebagai penyebar informasi yang belum maksimal. • Penelitian ini mengkaji mengenai kolaborasi <i>stakeholder</i> dalam penurunan stunting di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan <i>framework</i> kerja sama pentahelix. Penelitian ini lebih mengevaluasi peranan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam collaborative governance kaitannya dalam penurunan stunting.
10.	Candarweni & Amy. (2020). Collaborative governance to achieve SDGs social development: Preventing stunting lesson from Pandeglang. <i>EDP Sciences</i> .	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan program pengentasan stunting di Kabupaten Padeang telah dilaksanakan. Bahwa program yang dijalankan hanya bersifat "formalisme" untuk memenuhi persyaratan kinerja pemerintah pusat. Program-program yang dijalankan oleh OPD memiliki target masing-masing yang tidak saling terkait, sehingga kinerja tim koordinasi penanganan stunting hanya diukur berdasarkan kinerja dinas kesehatan • Penelitian ini membahas mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan collaborative governance di Kabupetn Padeang. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori collaborative governance oleh Emerson dan Nabatchi dengan pendekatan post-positivisme.
11.	Syafrawati, dkk. (2023). Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. <i>Plos One</i> , 18(03).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong pengentasan <i>stunting</i> di Provinsi Sumatera Barat yang meliputi peran kuat instansi terkait sebagai sektor utama dalam tindakan konvergensi stunting, peningkatan kualitas data stunting, dukungan pendanaan yang memadai, dan komitmen tinggi dari Puskesmas terhadap kesehatan ibu. Selain itu, pelaksanaan tugas oleh aktor yang ditugaskan dalam program serta

			pemantauan dan evaluasi terintegrasi juga mempengaruhi penurunan stunting. • Penelitian ini menggunakan model IPOO sebagai <i>framework</i> dalam menganalisis permasalahan mengenai penurun stunting di Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji mengenai identifikasi mengenai informan-informan dalam kolaborasi ini.
12.	Wensheng, He & Xiao Yue. (2023). Collaborative Governance in Disertification Control in China: A Case Study of Hobq Desert. <i>MDPI</i> , 15(3)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian penggurunan yang dilakukan Tiongkok telah berhasil membentuk sistem pemerintahan kolaboratif yang dipimpin pemerintah Tiongkok. • Penelitian ini menggunakan analisis <i>framework</i> dalam mengkaji mengenai collaborative governance dalam pengendalian penggurunan di Gurun Hobq. Penelitian ini mengkaji mengenai dimensi nilai, dimensi structural, dimensi intitusional, serta dimensi mekanisme.
13.	Fabian & Magdalena, (2019). Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination. <i>MDPI</i> , 11(23).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki peran penting dalam menindaklanjuti proses kolaboratif pariwisata di South Tyrol, Italia. Kurangnya kepemimpinan dalam hal ini sebagian disebabkan oleh perubahan kelembagaan yang terjadi di South Tyrol (Italia) dalam beberapa tahun terakhir. • Penelitian ini membahas mengenai proses kolaboratif pariwisata di South Tyrol, Italia dengan menggunakan model collaborative governance menurut Ansell and Gash.
14.	Kamilah & Iwan. (2024). Evaluation of collaborative water governance in the Cinambo Sub-watershed, Bandung City (case	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wetland Park Cisurupan cukup memenuhi prinsip-prinsip tata kelola air kolaboratif di sub-DAS. Komunikasi antara pemangku kepentingan melalui WhatsApp dan Instagram dianggap efektif untuk koordinasi, meningkatkan partisipasi

	study: Wetland Park Cisarupan). <i>IOP Conference Series. Earth and Environmental Science: Bristol</i> , 1218(1)		publik, dan mencegah konflik dengan keterbukaan dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif menjadi salah satu kunci konsistensi dalam tata kelola kolaboratif. • Penelitian ini membahas mengenai prinsip <i>Water Governance</i> dengan menggunakan big data serta analisis <i>Python</i> dengan meng-export WhatsApp chats. Penelitian ini lebih berfokus dalam komunikasi antar-stakeholder dalam menyelenggarakan tata kelola air kolaboratif di Wetland Park Cisarupan.
15.	Boadu, Evans. (2024). Evaluating Ghana's Youth-Centered Food-Security Policies: A Collaborative Governance Approach. <i>MDPI</i> , 16(9).	Kualitatif	Masalah keamanan pangan dan sosial yang kompleks di Ghana memerlukan program dan langkah yang benar. Selain itu, isu keamanan pangan dan kebijakan intervensi untuk anak memerlukan pendekatan non-linier dalam desain, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kolaborasi antara kementerian pemerintah, masyarakat sipil, serta departemen lokal dan nasional sangat penting untuk keberlanjutan kebijakan yang sukses. • Penelitian ini membahas mengenai kebijakan inisiatif, kapasitas institusional, serta implementasi pada collaborative governance dalam menyelesaikan permasalahan keamanan pangan dan sosial yang kompleks di Ghana.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan, hampir semua penelitian membahas mengenai metode *collaborative governance* secara keseluruhan. Tidak hanya itu, beberapa penelitian membahas proses *collaborative governance* dalam mengkaji peranan *stakeholder* di dalamnya. Salah satu permasalahan mengenai *collaborative governance* yang sering ditemukan adalah kurangnya komitmen *leading sector* yang menyebabkan tujuan utama belum bisa terwujud. Permasalahan mengenai komitmen juga mencakup rendahnya partisipasi *stakeholder* dan kurangnya rasa memiliki. Tidak hanya itu, pihak swasta tidak sepenuhnya terlibat dalam *collaborative governance* terkait sehingga pihak yang aktif hanyalah pihak pemerintah. Adanya permasalahan mengenai komitmen menyebabkan pelaksanaan *collaborative governance* tidak bisa berjalan secara maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai komitmen *stakeholder* dalam menyelenggarakan program “DASHAT” di Desa Surengede. Topik ini merupakan sebuah ide baru dikarenakan belum banyak penelitian yang menggunakan perspektif *commitment to the process*.

Commitment to the process merupakan salah satu faktor dari proses *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Chris Ansell & Alison Gash. *Commitment to the process* menjadi kunci dalam penyelenggaraan kolaborasi antar-*stakeholder*. Hal itu dikarenakan *commitment to the process* merupakan variable penting yang memengaruhi keberhasilan dari kolaborasi. Namun begitu, mayoritas penelitian terdahulu yang telah ditemukan hanya membahas mengenai *collaborative governance* secara keseluruhan. Sementara itu, *commitment to the*

process sebagai faktor yang memengaruhi proses kolaborasi perlu dikaji lebih dalam. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami mengenai komitmen para *leading sectors* yang terlibat dalam Program DASHAT di Desa Surengede. Dengan menggunakan perspektif *collaborative governance*, peneliti mengkaji mengenai *commitment to the process* dan mendalami mengenai hambatan-hambatan kaitannya dengan komitmen *stakeholder* yang mempengaruhi ketercapaian Program DASHAT di Desa Surengede

1.6.2 Kajian Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik telah ada sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terstruktur dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal sebagai administrasi publik (Toha, 2008). Lebih lanjut, menurut Chandler & Plano (Dalam Pradipta et al., 2015) administrasi publik merujuk pada proses di mana sumber daya dan pelayan publik diatur dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. McCurdy (Dalam Prastiyo, 2023) mengungkapkan bahwa administrasi publik juga dapat dilihat sebagai suatu aspek politik yang merupakan salah satu metode untuk mengatur suatu negara dan memenuhi berbagai fungsi negara. Dengan kata lain, administrasi publik mencakup semua tindakan

pemerintah yang dilakukan sesuai dengan janji-janji kebijakan yang dibuat selama kampanye pemilihan.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Thomas S. Kuhn (Dalam Anggriani Alamsyah, 2016) paradigma merujuk pada cara pandang, sekumpulan prinsip, pendekatan, atau metode yang digunakan oleh komunitas ilmiah untuk memecahkan suatu masalah pada saat tertentu. Pergeseran paradigma adalah indikator untuk melihat bagaimana suatu disiplin ilmu bisa berkembang, Nicholas Henry (Dalam Anwaruddin, 2004) menyebutkan bahwa standar suatu disiplin ilmu mencakup fokus dan lokus. Lebih jauh, Henry juga menyebutkan telah terjadi 6 paradigma dalam administrasi negara yang dirincikan sebagai berikut:

a. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma ini dikenal sebagai Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Menurut Frank J. Goodnow dan Leonard D. White, administrasi harus fokus pada pelaksanaan kebijakan atau implementasi kehendak rakyat, sementara politik harus berkonsentrasi pada pembahasan dan penentuan isu-isu tersebut. Dalam karya Goodnow yang berjudul "Politics and Administration" paradigma ini ditekankan pada lokusnya, yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan aspek

Administrasi Publik seperti masalah politik, kebijakan, dan pemerintahan kurang mendapatkan perhatian yang jelas.

Selanjutnya, paradigma ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa administrasi harus dipandang sebagai kegiatan bebas nilai yang diarahkan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan ekonomi birokrasi pemerintah.

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma ini melibatkan tokoh-tokoh Willoughby, Gullick, dan Urwick yang sangat dipengaruhi oleh para pemikir manajemen klasik seperti Henry Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik, yang dikenal sebagai POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengadaan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran). Paradigma ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip manajemen dapat diterapkan di mana saja, termasuk dalam organisasi pemerintah, sehingga fokusnya menjadi kurang jelas.

c. Paradigma 3: Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Paradigma ini memandang administrasi publik sebagai cabang ilmu politik dengan birokrasi pemerintahan sebagai lokusnya. Namun, karena prinsip-prinsip administrasi publik memiliki banyak kelemahan, fokusnya menjadi kabur. Pada tahun 1946, Morstein-Marx merupakan orang pertama yang mempertanyakan pemisahan administrasi dan politik sebagai hal

yang tidak mungkin dilakukan. Herbert Simon mengkritik prinsip-prinsip administrasi yang tidak konsisten dan berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak selalu relevan karena administrasi publik berasal dari ilmu politik. John Gaus kemudian menegaskan bahwa teori administrasi publik juga merupakan teori politik. Adanya status ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang unggul pada saat itu, menyebabkan administrasi publik mengalami krisis identitas.

d. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menekankan bahwa administrasi negara lebih berfokus pada prinsip-prinsip manajemen yang sudah populer dan dikembangkan secara ilmiah, seperti manajemen yang maju, perilaku organisasi, analisis sistem, dan riset operasi. Pada paradigma ini, terdapat dua jalur pengembangan, yaitu yang berfokus pada kemajuan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial, dan yang berfokus pada kebijakan publik. Semua fokus yang dibahas dianggap berlaku untuk administrasi publik maupun bisnis, sehingga lokusnya menjadi tidak jelas.

e. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang jelas. Lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik.

f. Paradigma 6: Governance (1990-sekarang)

Paradigma governance telah hadir sejak tahun 1980-an hingga 1990-an, sehingga paradigma ini bukanlah paradigma yang benar-benar baru. Namun begitu, dalam paradigma governance terdapat tujuan-tujuan baru dalam penyelenggaraan administrasi publik. Paradigma ini dapat digambarkan sebagai pelaksanaan otoritas pemimpin politik untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Di dalam paradigma ini juga disebutkan bahwa pembentukan kebijakan publik dilaksanakan oleh banyak sektor yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana masyarakat dan pemerintah berinteraksi.

Menurut Tamayao (Dalam Sunu, Retno, Hardi Warsono, 2020) paradigma governance dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara yang memiliki proses yang kompleks dan masyarakat dapat berpartisipasi serta memegang kekuasaan. Selanjutnya, governance juga memerlukan sektor lain yang dapat menguntungkan secara keuangan dan dapat menyediakan layanan sementara pemerintah hanya mengatur dan mengarahkan. Gibson (dalam Retno, 2020) juga menyebutkan bahwa governance

melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini melibatkan penduduk local, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini termasuk dalam paradigma ke-6 yaitu governance. Hal ini dikarenakan Program DASHAT merupakan program multisector dan pemerintah tidak menjadi satu-satunya pihak yang terlibat. Namun begitu, pihak swasta serta masyarakat ikut serta dalam penyelenggaraan Program DASHAT ini.

1.6.2.3 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah cabang atau satu aspek dari bidang studi yang lebih luas yakni ilmu administrasi publik (Yudhiantara, 2021). Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada Masyarakat (Nor Ghofur, 2014). Sementara itu, Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (Dalam Yusri, 2020) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Dari uraian diatas tampak bahwa Manajemen Publik mencakup subyek yang sangat kompleks. Fokus studinya tidak sederhana bagaimana seorang manajer mengelola organisasi public atau bagaimana orang-orang di-manage dalam organisasi

publik. Aktivitas manajemen publik akan selalu bersentuhan dengan masalah kebijakan publik, politik dan berbagai kepentingan publik.

1.6.2.4 Governance

Konsep governance adalah evolusi dari istilah government. Konsep ini merupakan konsep yang lebih modern yang menggantikan konsep tradisional government. Dalam konsep government, pelaksanaan pemerintahan terpusat hanya pada peran pemerintah, tanpa melibatkan civil society atau sektor swasta. Di konsep governance, civil society dan sektor swasta memiliki peran dan dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Konsep governance berasal dari kata govern, yang merujuk pada peran luas yang melibatkan proses-proses, peraturan, dan lembaga manajemen dan mengendalikan masalah-masalah yang bersifat kolektif dalam civil society. Oleh karena itu, secara umum, governance mencakup semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan non-pemerintah (Dwiyanto, 2015). Dengan pergeseran paradigma dari government menuju governance, konsep governance dapat mewujudkan adanya kolaborasi yang seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan civil society, muncul pandangan baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai good governance atau pemerintahan yang baik.

1.6.2.5 Collaborative Governance

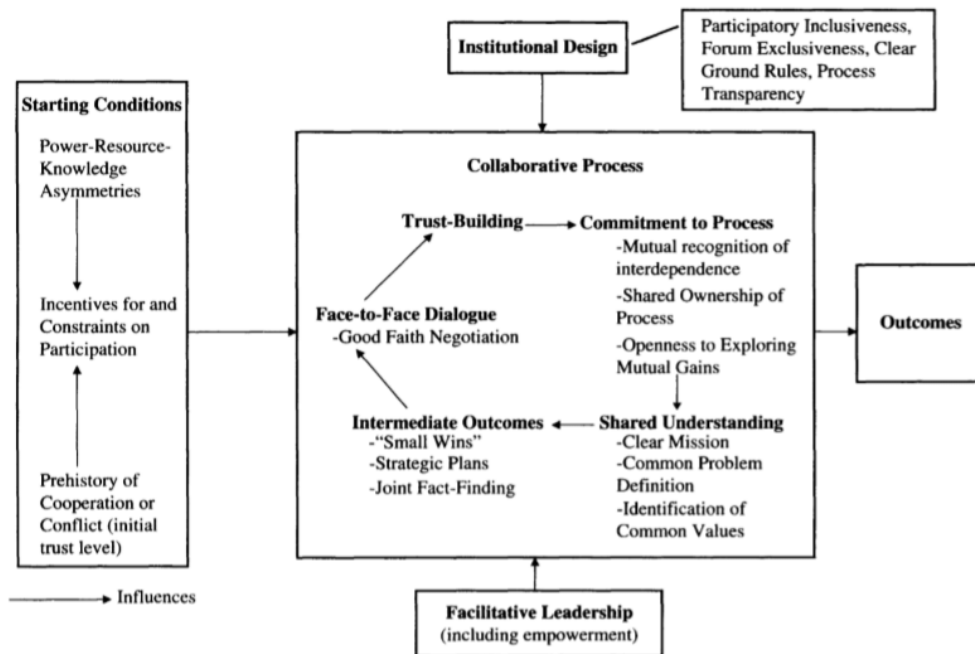
Menurut Ansell dan Gash (2007) Collaborative governance adalah rangkaian pengaturan mengenai keterlibatan lembaga publik dengan

stakeholders non-pemerintah dalam rangka proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berfokus pada konsensus, dan bersifat deliberatif, dengan tujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. Ansel dan Gash juga mengembangkan enam kriteria penting untuk kolaborasi. Enam dimensi ini mencakup (1) forum, (2) peserta forum (3) peserta terlibat aktif, (4) forum diatur secara resmi dan mengadakan pertemuan kolektif, (5) forum ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan (meskipun konsensus mungkin tidak selalu tercapai dalam praktik), dan (6) kolaborasi ini berfokus pada kebijakan publik atau pengelolaan.

Lebih lanjut, Agranof & McGuire (2009) menyoroti bahwa *collaborative governance* menekankan kolaborasi sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multisektor, karena tuntutan dari klien sering melebihi kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, sehingga memerlukan interaksi antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. Selanjutnya, Davis Althea (2012) menjelaskan bahwa *collaborative governance* melibatkan kemitraan antara institusi pemerintah untuk penyediaan layanan publik. Ini merupakan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan tata kelola kolaboratif, di mana mitra bersama-sama mengembangkan tujuan dan strategi, serta berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

1.6.2.6 Proses Collaborative Governance

Gambar 6 Model Collaborative Governance Ansell & Gash



Sumber: Ansell & Gash (2008)

Menurut Ansell dan Gash (2007), proses kolaborasi merupakan serangkaian proses atau cara mengatur atau memerintah secara institusional. Hal ini juga berindikasi bahwa institusi yang terlibat tidak hanya pemerintah, namun ada non-pemerintah atau non-profit yang ikut serta sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. Selanjutnya, Menurut Ansell dan Gash (2007) terdapat 5 dimensi yang mempengaruhi proses terbentuknya collaborative governance, yaitu:

1) Face-to-face Dialogue

Dialog tatap muka merupakan indikator awal dalam proses collaborative governance. Di dalam indikator ini, perencanaan dan konsep mengenai kolaborasi akan dibuat. Selanjutnya, dalam dialog antar muka sering terjadi hambatan seperti perbedaan pendapat antar sektor yang terlibat. Maka dari itu, komunikasi dua arah untuk mencapai keputusan bersama harus dilakukan. Indikator *face-to-face dialogue* juga dapat diukur dengan adanya itikad negosiasi yang baik (*good faith negotiation*) dari sektor yang terlibat. Nantinya, negosiasi yang telah ditetapkan akan menghasilkan keputusan bersama yang dapat mewujudkan tujuan utama dari adanya kolaborasi.

2) *Trust Building*

Indikator selanjutnya yaitu trust building atau membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan menjadi dasar pelaksanaan suatu kolaborasi. Indikator trust building juga merupakan salah satu kunci dari ketercapaian kolaborasi yang maksimal. Maka dari itu, masing-masing *stakeholder* harus mempunyai keyakinan antar-pihak.

3) *Commitment to the process*

Komitmen adalah elemen yang sangat krusial dalam proses kolaborasi. Komitmen sendiri memiliki hubungan erat dengan motivasi mendasar para *stakeholder* dalam kolaborasi. Di dalam indikator *commitment to the process*, ada 3 dimensi penting, yaitu:

a) *Mutual recognition of Interdependence*

Poin ini menjelaskan mengenai pengakuan saling bergantung oleh *stakeholder* yang terlibat. Hal ini dikarenakan permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

b) *Shared ownership of process*

Poin ini menjelaskan mengenai kepemilikan bersama atas proses kolaborasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan tanggung jawab setiap *stakeholder* yang terlibat.

c) *Openness to exploring mutual gains*

Poin terakhir merupakan keterbukaan untuk mencari keuntungan bersama. Dalam poin ini, masing-masing *stakeholders* yang terlibat dapat saling terbuka dalam keuntungan yang ini diwujudkan.

4) *Shared Understandings*

Shared Understanding atau pemahaman bersama adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar actor. Dalam indikator ini, ada 3 poin yang dapat diukur, yaitu:

a) *Clear Mission*

Pelaksanaan kolaborasi harus memiliki tujuan yang jelas. Tidak hanya itu, antar-*stakeholders* juga harus memiliki kesamaan tujuan.

b) *Common problem definition*

Para *stakeholder* harus memiliki kesepakatan mengenai pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang

akan diatasi. Poin ini juga bertujuan agar para *stakeholder* yang terlibat dapat memiliki gagasan dan pandangan yang sama mengenai permasalahan yang akan diselesaikan.

c) *Identification of Common Values*

Poin terakhir dapat diartikan sebagai identifikasi nilai-nilai bersama. Dengan adanya keselarasan mengenai nilai-nilai yang dipegang oleh para *stakeholders*, maka kesalahpahaman dapat diminimalisir.

5) *Intermediate Outcome*

Indicator terakhir merupakan hasil sementara. Hasil sementara dalam proses kolaborasi berfungsi sebagai nilai dasar dalam keberhasilan kolaborasi. Hasil sementara juga dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaboratif, mendorong siklus membangun kepercayaan dan komitmen yang baik. Terdapat 3 faktor dalam indicator Intermediate Outcome, yaitu:

a) *“Small Wins”*

Kemenangan kecil dalam proses *collaborative governance* sangat penting untuk media *feedback* dan untuk menginspirasi *stakeholder* untuk melakukan tindakan dan berinovasi dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal.

b) *Strategic Plans*

Strategi berkaitan erat dengan konsep perencanaan dan pengambilan Keputusan oleh *stakeholder* yang terlibat.

c) *Join Fact-Finding*

Capaian dari kerja sama.

1.6.2.7 *Commitment to The Process*

Margerum (Dalam Ansell & Gash, 2008) menyatakan bahwa tingkat komitmen para pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah variable penting yang memengaruhi keberhasilan *collaborative governance*. Lemahnya komitmen instansi pemerintah juga sering dilihat sebagai masalah besar dalam kolaborasi. Dalam penelitian ini, focus teori yang dipilih merupakan *commitment to process*. Hal ini dikarenakan komitmen merupakan elemen penting dari proses kolaboratif yang harus dimiliki oleh semua *stakeholder* terlibat. *Commitment to the process* sangat penting untuk mencapai tujuan *collaborative governance*. Menurut Agbodzakey (2024), komitmen para *stakeholder* yang bersifat wajib maupun sukarela akan mempengaruhi keberhasilan *collaborative governance* meskipun menimbulkan sejumlah dana, risiko, dan beban terhadap keterwakilan dan partisipasi dari *stakeholder*. Tidak hanya itu, komitmen para *stakeholder* juga terkait dengan motivasi dalam penyelenggaraan kolaborasi. Selanjutnya, menurut Ansell & Gash (Dalam Tinessia, 2023) dalam *commitment to the process* terdapat 3 dimensi penting yang dapat dikaji, yaitu:

a) *Mutual recognition of Interdependence*

Menurut Ansell & Gash (dalam Agung, 2020) *Mutual recognition of interdependence* adalah pengakuan atas saling ketergantungan dalam

hal ini adalah pengakuan ketergantungan dalam melaksanakan kolaborasi. Elemen ini merupakan elemen dasar dalam *commitment to the process*. Hal ini dikarenakan elemen ini menjelaskan mengenai pengakuan saling bergantung oleh *stakeholder* yang terlibat. Lebih lanjut, permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

b) *Shared ownership of process*

Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), *shared ownership of process* berarti saling berbagi dalam proses kolaborasi. Dalam berkolaborasi masing-masing *stakeholder* dituntut untuk saling terbuka satu sama lain, jujur dan saling berbagi. Poin ini menjelaskan mengenai kepemilikan bersama atas proses kolaborasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan tanggung jawab setiap *stakeholder* yang terlibat.

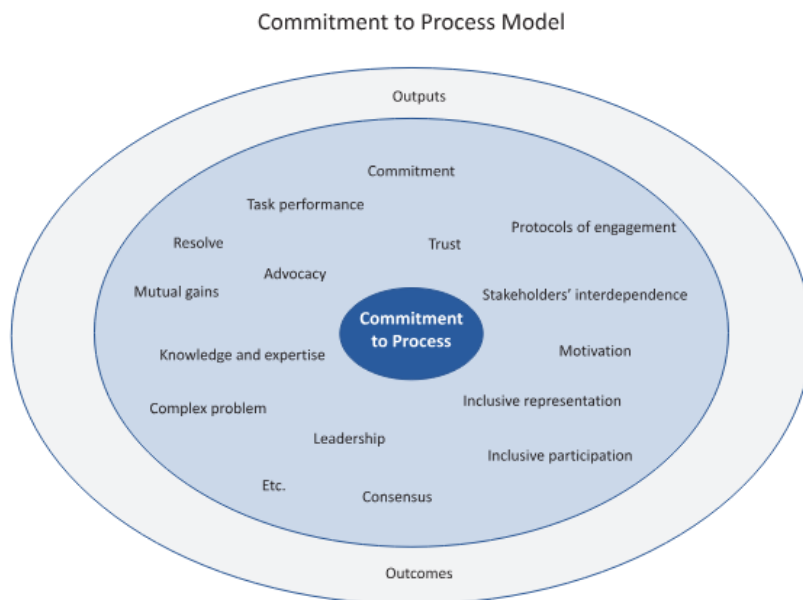
c) *Openness to exploring mutual gains*

Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), *openness to exploring mutual gains* adalah keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama. Poin terakhir merupakan keterbukaan untuk mencari keuntungan bersama. Dalam poin ini, masing-masing *stakeholders* yang terlibat dapat saling terbuka dalam keuntungan yang ingin diwujudkan.

1.6.2.8 Faktor-faktor *Commitment to The Process*

Komitmen *stakeholder* lintas sektor terhadap tata kelola kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan sinergis dan mendorong kerja sama untuk mencapai keberhasilan kolaboratif. Kesediaan pemangku kepentingan untuk terlibat satu sama lain dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks menyebabkan mereka menyumbangkan waktu dan sumber daya mereka secara sukarela. Komitmen *stakeholder* merefleksikan tingkat saling pengakuan dan penghargaan atas kontribusi yang diberikan sehingga menghasilkan dampak yang positif. Namun, realitas tata kelola kolaboratif mencakup kekurangan yang tidak dapat dihindari karena adanya faktor pendorong atau penarik.

Gambar 7 Model *Commitment to The Process*



Sumber: James Agbodzakey (2024)

Menurut Agbodzakey (2024), tata kelola kolaboratif berfokus pada permasalahan publik yang kompleks dan menuntut beragam tingkat keterlibatan *stakeholder*. Komitmen para *stakeholder* terkait proses kolaboratif mendorong ketercapaian *collaborative governance* yang nantinya berdampak untuk masyarakat luas. Selanjutnya, Agbodzakey (2024) merumuskan faktor-faktor dari *commitment to the process*, yaitu:

a) Komitmen

Menurut Porter (dalam Darmawan, 2013) komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Menurut Agbodzakey (2024), komitmen menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *collaborative governance*. Hal ini dikarenakan komitmen *stakeholder* memegang peranan penting dalam keberhasilan secara keseluruhan. Selanjutnya, keputusan awal *stakeholder* untuk bergabung dalam kolaborasi menunjukkan tekad yang mereka punya. Dalam Program DASHAT, komitmen merupakan dasar dan tekad *stakeholder* dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede.

b) *Complex Problem*

Menurut Agbodzakey (2024), *complex problems* adalah permasalahan publik yang kompleks yang memerlukan pendekatan alternatif. Selanjutnya, merangkul *stakeholder* yang

relevan di seluruh sektor yang tertarik dan berkomitmen mengatasi masalah publik yang kompleks mendorong adanya *commitment to the process*. Partisipasi yang didasari dengan rasa kesatuan dan kemauan untuk menciptakan solusi bersama dapat mempengaruhi *commitment to the process*.

c) *Trust*

Menurut Chen (dalam Agbodzakey, 2024) kepercayaan adalah ikatan yang tulus di antara para pemangku kepentingan yang biasanya dicontohkan dengan percaya satu sama lain. *Commitment to the process* bergantung pada kepercayaan masing-masing *stakeholder*. Para *stakeholder* harus saling percaya satu sama lain agar tujuan dan sasaran kolaborasi dapat diwujudkan. Menurut Agbodzakey (2024), kepercayaan menjadi elemen penting dalam *commitment to the process* karena membantu untuk mempertahankan keterlibatan kolaborasi.

d) *Protocols*

Menurut North (Dalam Agbodzakey, 2024), protocol adalah penghubung bagi keterlibatan *stakeholder* dalam memanfaatkan kekuatannya satu sama yang lain untuk memecahkan masalah publik. Keterlibatan *stakeholder* secara merata juga akan memperkuat komitmen mereka pada proses kolaborasi. Sehingga,

diperlukan protocol yang adil bagi semua *stakeholder* agar menciptakan keyakinan dalam proses *collaborative governance*.

e) *Stakeholder' Interdependence*

Menurut Agbodzakey (2024), *Stakeholder' Interdependence* adalah kesadaran *stakeholder* mengenai kepentingan untuk saling bergantung untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Selanjutnya, kesadaran *stakeholder* mengenai kepentingan untuk saling bergantung dapat membantu dalam membangun *commitment to the process*. Menurut Tinessia (2023), keterbatasan masing-masing pihak yang terlibat dapat menumbuhkan rasa saling ketergantungan.

f) Motivasi

Menurut Agbodzakey (2024), Motivasi *stakeholder* adalah dorongan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan kesediaan *stakeholder* untuk terlibat melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan *collaborative governance*. Selanjutnya, motivasi *stakeholder* terlibat dapat meningkatkan proses *commitment to the process*.

g) *Representation and Participation*

Menurut Agbodzakey (2024), *Representation and Participation* adalah tekad *stakeholder* untuk melakukan tindakan kolektif yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan kolaboratif. Tindakan

kolektif diwujudkan dengan keterwakilan yang inklusif dan partisipasi. Partisipasi *stakeholder* dapat tumbuh melalui interaksi rutin.

h) *Consensus*

Menurut Agbodzakey (2024), consensus adalah kesepakatan di antara *stakeholder* terkait dengan penyelesaian dan tindakan yang dilakukan dalam mengentaskan masalah public. Pengambilan keputusan dari perspektif yang berbeda akan menghasilkan konsensus. Dalam mendapatkan konsensus, diperlukan dialog dan rundingan untuk mencapai titik temu. Adanya dialog yang dihasilkan dari perbedaan perspektif para *stakeholder* akan menumbuhkan *commitment to the process* dikarenakan semua *stakeholder* memiliki kesempatan untuk bermusyawarah bersama.

i) *Leaders*

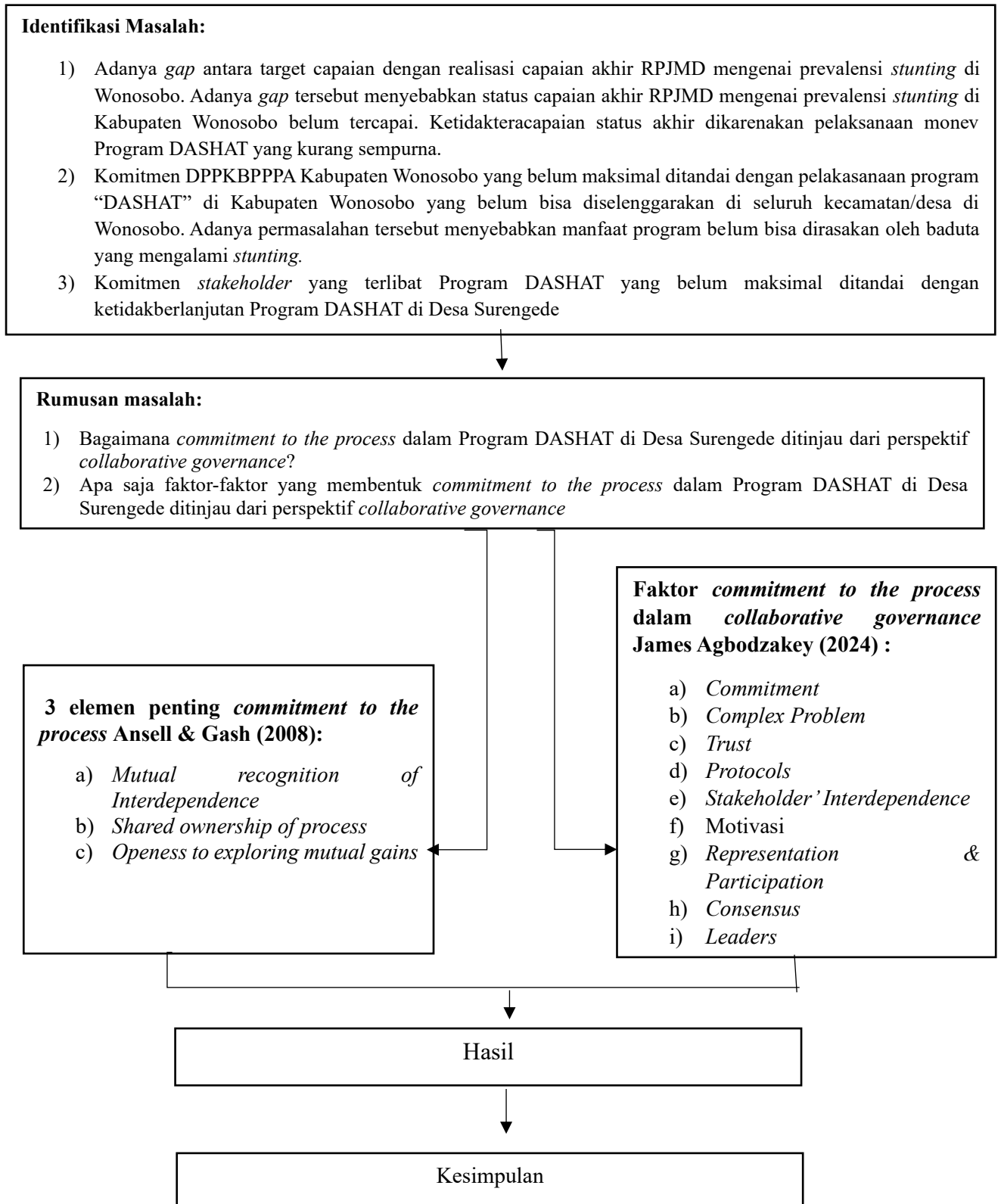
Menurut Agbodzakey (2024) Pemimpin adalah *key player* dalam *collaborative governance* yang bertanggung jawab dalam keberhasilan *collaborative governance*. Pemimpin yang dapat memfasilitasi peran dalam proses kolaborasi dapat mendorong *commitment to the process*.

1.6.2.9 *Stunting*

Menurut World Health Organization (WHO), Stunting merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak yang terlalu rendah. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi ($<-2SD$) dari tabel status gizi WHO child growth standard. Menurut Kementerian Kesehatan, Balita Pendek (Stunting) adalah status gizi yang didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U, yang dibuktikan dengan hasil pengukuran berada pada ambang batas (Z-Score) $<-2 SD$ sampai dengan $-3 SD$ (pendek/ stunted) dan $<-3 SD$ (sangat pendek / severely stunted). Stunting pada anak dapat terjadi jika status gizi pada anak tersebut sangat kurang dalam jangka waktu yang lama. Status gizi stunting atau yang sering disebut dengan balita pendek didasarkan pada indeks PB/U atau TB/U.

1.6.3 Kerangka Berpikir

Gambar 8 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

Menurut Ansell dan Gash (2007) proses kolaborasi merupakan serangkaian proses atau cara mengatur atau memerintah secara institusional. Hal ini juga berindikasi bahwa institusi yang terlibat tidak hanya pemerintah, namun ada non-pemerintah atau non-profit yang ikut serta sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya.

Selanjutnya salah satu faktor dari proses *collaborative governance* adalah *commitment to the process*. Margerum (dalam Ansell dan Gash, 2008), menyatakan bahwa tingkat komitmen para pemangku kepentingan terhadap kolaborasi adalah variabel penting yang memengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif. Survei di kelompok kolaboratif di Amerika dan Australia menunjukkan bahwa komitmen anggota merupakan faktor terpenting yang mendukung kolaborasi. Lemahnya komitmen instansi pemerintah dalam kolaborasi juga sering dianggap sebagai masalah besar (Wondolleck & Yaffee, 2000). Selanjutnya, dalam *commitment to the process* yang diperkenalkan oleh Ansell dan Gash (2008) juga memiliki 3 dimensi penting, yaitu:

a) *Mutual recognition of Interdependence*

Poin ini menjelaskan mengenai pengakuan saling bergantung oleh *stakeholder* yang terlibat. Hal ini dikarenakan permasalahan mengenai *stunting* tidak dapat diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Maka dari itu, kolaborasi yang dilaksanakan dalam Program

DASHAT memiliki ketergantungan yang dirasakan oleh masing-masing pihak.

b) Shared ownership of process

Poin ini menjelaskan mengenai kepemilikan bersama atas proses kolaborasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kolaborasi mengenai Program DASHAT merupakan tanggung jawab setiap *stakeholder* yang terlibat.

c) Openess to exploring mutual gains

Poin terakhir merupakan keterbukaan untuk mencari keuntungan bersama. Dalam poin ini, masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam Program DASHAT dapat saling terbuka dalam keuntungan yang ini diwujudkan. Seperti misalnya, dalam pihak pemerintah, pemerintah dapat memiliki keuntungan yaitu capaian akhir RPJMD mengenai *stunting* bisa sesuai target. Selanjutnya, pada pihak swasta contohnya dalam Aqua Wonosobo. Keuntungan yang bisa diambil yaitu bisa mewujudkan program Aqua Wonosobo & LPTP Surakarta yaitu TANGKAS. Dari pihak masyarakat, keuntungan yang dapat dicapai adalah kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan makanan.

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *commitment to the process* dalam *collaborative governance*. Agbodzakey (2024) merumuskan faktor-faktor dari *commitment to the process*, yaitu:

a) Komitmen

Menurut Agbodzakey (2024), komitmen menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *collaborative governance*. Hal ini dikarenakan komitmen *stakeholder* memegang peranan penting dalam keberhasilan secara keseluruhan. Selanjutnya, keputusan awal *stakeholder* untuk bergabung dalam kolaborasi menunjukkan tekad yang mereka punya. Dalam Program DASHAT, komitmen merupakan dasar dan tekad *stakeholder* dalam mengentaskan *stunting* di Desa Surengede.

b) *Complex Problem*

Merangkul *stakeholder* yang relevan di seluruh sektor yang tertarik dan berkomitmen mengatasi masalah publik yang kompleks mendorong adanya *commitment to the process*. Menurut Agbodzakey (2024), partisipasi yang didasari dengan rasa kesatuan dan kemauan untuk menciptakan solusi bersama dapat mempengaruhi *commitment to the process*. Permasalahan mengenai *stunting* merupakan isu publik yang kompleks sehingga diperlukan *stakeholder* yang relevan pada bidangnya.

c) *Trust*

Menurut Chen (dalam Agbodzakey, 2024) kepercayaan adalah ikatan yang tulus di antara para pemangku kepentingan yang biasanya dicontohkan dengan percaya satu sama lain. *Commitment to the process* bergantung pada kepercayaan

masing-masing *stakeholder*. Para *stakeholder* harus saling percaya satu sama lain agar tujuan dan sasaran kolaborasi dapat diwujudkan. Menurut Agbodzakey (2024), kepercayaan menjadi elemen penting dalam *commitment to the process* karena membantu untuk mempertahankan keterlibatan kolaborasi. Dalam imlementasi program DASHAT di Desa Surengede, kepercayaan antar-*stakeholder* menjadi kunci agar sasaran kolaborasi dalam pengentasan *stunting* dapat dilaksanakan.

d) *Protocols*

Menurut North (Dalam Agbodzakey, 2024), protocol adalah penghubung bagi keterlibatan *stakeholder* dalam memanfaatkan kekuatannya satu sama yang lain untuk memecahkan masalah publik. Partisipasi *stakeholder* dalam menetapkan protocol dalam keberjalanan *collaborative governance* sangat penting untuk *commitment to the process* terkait. Keterlibatan *stakeholder* secara merata juga akan memperkuat komitmen mereka pada proses kolaborasi. Sehingga, diperlukan protocol yang adil bagi semua *stakeholder* agar menciptakan keyakinan dalam proses *collaborative governance*. Protocol dalam Program DASHAT dapat berbentuk aturan yang adil bagi seluruh *stakeholder*.

e) *Stakeholder' Interdependence*

Menurut Agbodzakey (2024), *Stakeholder' Interdependence* adalah kesadaran *stakeholder* mengenai kepentingan untuk saling bergantung untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Menurut Tinessia (2023), keterbatasan masing-masing pihak yang terlibat dapat menumbuhkan rasa saling ketergantungan. *Stakeholder* dalam Program DASHAT perlu untuk menumbuhkan rasa ketergantungan satu sama lain agar terciptanya *commitment to the process*.

f) Motivasi

Menurut Agbodzakey (2024), Motivasi *stakeholder* adalah dorongan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan kesediaan *stakeholder* untuk terlibat melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan *collaborative governance*. Selanjutnya, keinginan atau motivasi *stakeholder* terlibat dapat meningkatkan proses *commitment to the process*. Dalam penyelenggaraan Program DASHAT di Desa Surengede, motivasi *stakeholder* merupakan hal yang penting agar program dapat terlaksana dengan baik.

g) *Representation and Participation*

Menurut Agbodzakey (2024), *Representation and Participation* adalah tekad *stakeholder* untuk melakukan tindakan kolektif yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan kolaboratif. Tindakan

kolektif diwujudkan dengan keterwakilan yang inklusif dan partisipasi. Partisipasi *stakeholder* dapat tumbuh melalui interaksi rutin. Pelaksanaan Program DASHAT membutuhkan partisipasi yang merata oleh semua *stakeholder* terlibat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki akan program yang akan diemban.

h) *Consensus*

Menurut Agbodzakey (2024), consensus adalah kesepakatan di antara *stakeholder* terkait dengan penyelesaian dan tindakan yang dilakukan dalam mengentaskan masalah publik. Dalam mendapatkan konsensus, diperlukan dialog dan rundingan untuk mencapai titik temu. Adanya dialog yang dihasilkan dari perbedaan perspektif para *stakeholder* akan menumbuhkan *commitment to the process* dikarenakan semua *stakeholder* memiliki kesempatan untuk bermusyawarah bersama. Dalam Program DASHAT, diperlukan adanya dialog dan rundingan untuk penyelenggaraan dan implementasi program sehingga terciptanya konsensus para *stakeholder* terlibat.

i) *Leaders*

Menurut Agbodzakey (2024) Pemimpin adalah *key player* dalam *collaborative governance* yang bertanggung jawab dalam keberhasilan *collaborative governance*. Pemimpin yang dapat

memfasilitasi peran dalam proses kolaborasi dapat mendorong *commitment to the process*. Dalam Program DASHAT, pihak DPPKBPPPA merupakan *leading sector*. Maka dari itu, pihak DPPKBPPPA sebagai fasilitator dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik agar program dapat berjalan dengan maksimal.

Tabel 5 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub-fenomena	Gejala	Pertanyaan
Dimensi <i>Commitment to The Process</i> dalam Collaborative Governance	<i>Mutual recognition of Interdependence</i> Menurut Ansell & Gash (2008), <i>Mutual recognition of interdependence</i> adalah pengakuan atas saling ketergantungan dalam hal ini adalah pengakuan ketergantungan dalam melaksanakan kolaborasi.	Adanya pengakuan saling bergantung antar-<i>stakeholder</i>	Bagaimana <i>stakeholder</i> mendefinisikan peran <i>stakeholder</i> dalam hubungan dengan pihak lain?
	<i>Shared Ownership of Process</i> Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), <i>shared ownership of process</i> berarti saling berbagi dalam proses kolaborasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa kolaborasi merupakan tanggung jawab setiap <i>stakeholder</i> yang terlibat.	- Adanya rasa kepemilikan bersama dalam Program DASHAT - Adanya tanggung jawab <i>stakeholder</i> dalam penyelenggaraan Program DASHAT	- Apa saja kontribusi <i>stakeholder</i> dalam program DASHAT? - Apa peran dan tanggung jawab <i>stakeholder</i> dalam program ini?
	<i>Openess to exploring mutual gains</i> Menurut Ansel & Gash (dalam Agung, 2020), <i>openess to exploring mutual gains</i> adalah keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama.	Adanya keterbukaan untuk mencari keuntungan dalam Program DASHAT	- Apa saja keuntungan spesifik melalui keterlibatan dalam Program DASHAT? - Apakah terdapat diskusi antar-<i>stakeholders</i> yang membahas mengenai

			keuntungan masing-masing pihak?
Faktor-faktor <i>Commitment to The Process</i> dalam Collaborative Governance	<i>Commitment</i> Menurut Porter (dalam Darmawan, 2013) komitmen adalah kuatnya keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Selanjutnya, komitmen juga diwujudkan dalam keputusan awal <i>stakeholder</i> untuk bergabung dalam kolaborasi menunjukkan tekad yang mereka punya	- Adanya keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam Program DASHAT - Adanya keputusan awal <i>stakeholder</i> untuk bergabung - Adanya tekad dalam bergabung Program DASHAT	- Sejauh mana <i>stakeholder</i> ikut terlibat dalam program DASHAT? - Apa saja yang membuat <i>stakeholder</i> memutuskan untuk bergabung program DASHAT? - Apa yang menjadi tekad dalam bergabung program DASHAT?
	<i>Complex Problem</i> Menurut Agbodzakey (2024), <i>complex problems</i> adalah permasalahan publik yang kompleks yang memerlukan pendekatan alternatif. Selanjutnya, merangkul <i>stakeholder</i> yang relevan di seluruh sektor yang tertarik dan berkomitmen mengatasi masalah publik yang kompleks mendorong adanya <i>commitment to the process</i>. Pendekatan alternatif dapat diwujudkan dalam partisipasi yang didasari dengan rasa kesatuan dan kemauan.	- Adanya rasa kesatuan dari masing-masing <i>stakeholder</i> di Program DASHAT - Adanya kemauan untuk menciptakan solusi bersama dalam pengentasan <i>stunting</i>	- Apakah masing-masing <i>stakeholder</i> memahami bahwa pengentasan <i>stunting</i> merupakan masalah yang kompleks? - Apakah masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki dorongan dalam menciptakan solusi bersama-sama dalam pengentasan <i>stunting</i>?

	• <i>Trust</i> Menurut Chen (dalam Agbodzakey, 2024) kepercayaan adalah ikatan yang tulus di antara para pemangku kepentingan yang biasanya dicontohkan dengan percaya satu sama lain. Menurut Agbodzakey (2024), kepercayaan menjadi elemen penting dalam <i>commitment to the process</i> karena membantu untuk mempertahankan keterlibatan kolaborasi	• Adanya rasa saling percaya satu sama lain dalam penyelenggaraan Program DASHAT	• Apakah ada rasa saling percaya satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan <i>stunting</i> melalui program “DASHAT”? • Apa saja bentuk dari kepercayaan oleh <i>stakeholder</i> terhadap <i>stakeholder</i> lainnya?
	• <i>Protocols</i> Menurut North (Dalam Agbodzakey, 2024), protocol adalah penghubung bagi keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam memanfaatkan kekuatannya satu sama yang lain untuk memecahkan masalah publik. Partisipasi <i>stakeholder</i> dalam menetapkan protocol dalam keberjalanan <i>collaborative governance</i> sangat penting untuk <i>commitment to the process</i> terkait. Selain itu, diperlukan protocol yang adil bagi semua <i>stakeholder</i> agar menciptakan keyakinan dalam proses <i>collaborative governance</i>	• Adanya partisipasi dalam menetapkan protocol dalam penyelenggaraan Program DASHAT • Adanya protocol yang adil bagi semua <i>stakeholder</i> Program DASHAT	• Apakah ada partisipasi <i>stakeholder</i> dalam menetapkan protocol dalam penyelenggaraan Program DASHAT? • Apakah protocol yang telah ditetapkan telah adil bagi semua <i>stakeholder</i> Program DASHAT?
	• <i>Stakeholder' Interdependence</i>	• Adanya kesadaran <i>stakeholder</i> Program	• Apakah ada kesadaran <i>stakeholder</i> Program

	Menurut Agbodzakey (2024), <i>Stakeholder' Interdependence</i> adalah kesadaran <i>stakeholder</i> mengenai kepentingan untuk saling bergantung untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Selanjutnya, kesadaran <i>stakeholder</i> mengenai kepentingan untuk saling bergantung dapat mengatasi masalah publik yang kompleks dan dapat membantu dalam membangun <i>commitment to the process</i>	DASHAT untuk saling bergantung	DASHAT untuk saling bekerja sama? • Apakah <i>stakeholder</i> memiliki kemauan untuk saling bekerja sama dalam program “DASHAT”?
	• Motivasi Menurut Agbodzakey (2024), Motivasi <i>stakeholder</i> adalah dorongan untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan kesediaan <i>stakeholder</i> untuk terlibat melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan <i>collaborative governance</i>	• Adanya keinginan <i>stakeholder</i> untuk terlibat dalam Program DASHAT • Adanya dorongan untuk bekerja sama dengan <i>stakeholder</i> lain dalam Program DASHAT • Adanya kesediaan <i>stakeholder</i> untuk melaksanakan tugas-tugas dalam Program DASHAT	• Apakah ada tekad <i>stakeholder</i> untuk terlibat dalam Program DASHAT? • Apakah ada dorongan untuk bekerja sama dengan <i>stakeholder</i> lain dalam Program DASHAT? • Apakah ada kesediaan <i>stakeholder</i> untuk melaksanakan tugas-tugas dalam Program DASHAT?
	• <i>Representation & Participation</i>	• Adanya keterwakilan <i>stakeholder</i> yang inklusif dan partisipatif	• Apakah <i>stakeholder</i> yang terlibat dapat

	Menurut Agbodzakey (2024), <i>Representation and Participation</i> adalah tekad <i>stakeholder</i> untuk melakukan tindakan kolektif yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan kolaboratif. Tindakan kolektif diwujudkan dengan keterwakilan yang inklusif dan partisipasi. Partisipasi <i>stakeholder</i> dapat tumbuh melalui interaksi rutin.	• Adanya interaksi rutin <i>stakeholder</i> dalam Program DASHAT	berpendapat secara luas dan bebas? • Apakah <i>stakeholder</i> dapat memberikan pandangan serta pendapat? • Apakah ada interaksi rutin <i>stakeholder</i> dalam Program DASHAT?
	• <i>Consensus</i> Menurut Agbodzakey (2024), <i>consensus</i> adalah kesepakatan di antara <i>stakeholder</i> terkait dengan penyelesaian dan tindakan yang dilakukan dalam mengentaskan masalah publik. Pengambilan keputusan dari perspektif yang berbeda akan menghasilkan konsensus. Dalam mendapatkan konsensus, diperlukan dialog dan rundingan untuk mencapai titik temu.	• Adanya dialog dan rundingan <i>stakeholder</i> dari Program DASHAT • Adanya kesepakatan antar-<i>stakeholders</i> dalam menyelesaikan masalah publik • Adanya perspektif mengenai masalah publik dari semua <i>stakeholder</i>.	• Apakah ada dialog dan rundingan <i>stakeholder</i> dari Program DASHAT? • Apakah ada kesepakatan antar-<i>stakeholders</i> dalam menyelenggarakan program “DASHAT”? • Bagaimana perspektif <i>stakeholder</i> mengenai program DASHAT dan <i>stunting</i>?
	• <i>Leaders</i> Menurut Agbodzakey (2024) Pemimpin adalah <i>key player</i> dalam <i>collaborative</i>	• Adanya pemimpin yang bertanggung jawab untuk program DASHAT.	• Apakah <i>leading sectors</i> terkait dapat

	<i>governance</i> yang bertanggung jawab dalam keberhasilan <i>collaborative governance</i>. Pemimpin yang dapat memfasilitasi peran dalam proses kolaborasi dapat mendorong <i>commitment to the process</i>	• Adanya pemimpin atau <i>leading sector</i> yang memfasilitasi peran.	bertanggung jawab dengan baik? • Apakah <i>leading sectors</i> terkait memfasilitasi proses kolaborasi dalam program “DASHAT”?
--	--	--	---

1.8 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan peneliti mengenai komitmen sektor yang terlibat kaitannya dengan *collaborative governance* dalam pengentasan *stunting* di Desa Surengede khususnya dalam Program DASHAT. Penurunan prevalensi *stunting* yang belum mencapai target RPJMD Tahun 2021-2026 memantik peneliti untuk dapat mendalami permasalahan ini. Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut, peneliti berpendapat bahwa komitmen para pihak yang terlibat dalam kolaborasi program DASHAT belum berjalan secara maksimal dan masih menemui berbagai kendala yang berdampak pada kesuksesan dari program DASHAT. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan “**Bagaimana dimensi *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*?”** dan “**Apa saja faktor-faktor dalam *commitment to the process* pada Program DASHAT di Desa Surengede ditinjau dari perspektif *collaborative governance*?”**. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mengidentifikasi *commitment to the process* yang terjadi dalam program DASHAT sebagai upaya pengentasan *stunting* di Desa Surengede.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006), metode deskriptif kualitatif mencakup pengamatan, analisis, dan penyimpulan tentang situasi tertentu dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang komprehensif. Pemilihan metode ini dikarenakan

Peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam kaitannya dengan implementasi Collaborative Governance dalam program DASHAT di Desa Surengede. Melalui penelitian ini, Peneliti bermaksud untuk mendalaminya dan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya di lapangan dengan memanfaatkan data dari para responden terkait. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data valid yang sesuai.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gagasan atau penjelasan tentang suatu fenomena tanpa melakukan perubahan atau manipulasi pada variable-variabel yang sedang diamati. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif *commitment to the process* pada *collaborative governance* dalam Program DASHAT di Desa Surengede.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs Penelitian Situs penelitian adalah lokasi di mana penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk menghimpun informasi dan data yang sebenarnya dari objek yang sedang diselidiki. Maka, situs penelitian dari penelitian ini berada di Desa Surengede.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk kepada individu, lokasi, atau objek yang diamati sebagai fokus utama dalam proses pengumpulan data dalam rangka penyelidikan atau studi. Bagi peneliti, subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang berhubungan langsung dengan penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Puposive Sampling*. Menurut Helaluddin (2019), teknik ini digunakan dalam pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada beberapa pertimbangan. Contohnya, orang yang dinilai dan dianggap mengetahui dan memahami mengenai hal yang diharapkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah para *stakeholder* yang terlibat dalam Program DASHAT di Desa Surengede. *Stakeholder* tersebut mencakup Pemerintah Kecamatan Kejajar, DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, Puskesmas Kejajar 1, Tim Penggerak PKK, kader penggerak desa, & penyuluh lapangan KB, pihak TANGKAS yang mencakup Aqua Wonosobo dan LPTP Surakarta sebagai mitra.

Tabel 6 Daftar Informan Program DASHAT

Informan	Keterangan
Roro Farighoh	Sebagai Kabid Pembangunan Keluarga dan Advokasi DPPKBPPPA Wonosobo memiliki tugas pokok dan fungsi secara langsung dalam mengimplementasikan Program DASHAT di Desa Surengede.
Susi Dwi Rakhmawati	Sebagai Bidan Desa Surengede dan petugas kesehatan yang terlibat dalam Program DASHAT di Desa Surengede
Ibu Leily	Sebagai pihak TANGKAS dan petugas dari pihak swasta yang ikut terjun langsung dalam Program DASHAT
Ibu Erlin	Sebagai penanggung jawab serta ketua penyelenggara Program DASHAT di Desa Surengede

Sumber: diolah Peneliti

1.9.4 Jenis Data

Ada dua jenis data di dalam sebuah penelitian. Kedua jenis data tersebut yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif dalam mengobservasi dan meneliti secara mendalam mengenai *Commitment to The Process* pada *Collaborative Governance* dalam Program DASHAT di Desa Surengede. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata atau informasi verbal. Data kualitatif dapat diperoleh melalui proses wawancara.

1.9.5 Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer didefinisikan sebagai data yang didapatkan secara langsung tanpa adanya perantara. Sehingga, peneliti mendapatkan data asli baik dari individu maupun kelompok. Di dalam penelitian ini, hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi secara langsung merupakan data primer. Wawancara dilakukan dengan para actor dari Collaborative Governance dalam Program DASHAT di Desa Surengede.

b) Data Sekunder

Data Sekunder didefinisikan sebagai jenis sumber data yang diambil oleh peneliti secara tidak langsung dengan bantuan perantara. Data sekunder ini berupa bukti, catatan, atau laporan sejarah yang telah

tersedia dalam arsip atau dokumen. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang diperoleh dalam rangka meneliti mengenai Program DASHAT di Desa Surengede.

1.9.6 Teknik Pengumpulan

a) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan kontak langsung dan wawancara dengan narasumber. Kegiatan wawancara sendiri merupakan kegiatan tanya-jawab antara Penulis dan narasumber yang bersangkutan dengan tujuan mendapatkan informasi langsung dari informannya.

Pada penelitian ini, wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dapat diartikan sesi wawancara berlangsung secara luwes dengan arah pertanyaan yang terbuka dan tidak kaku. Peneliti dapat mewawancarai dari semua *stakeholder* yang berkontribusi dalam *Collaborative Governance* dalam Program DASHAT di Desa Surengede ini.

b) Observasi

Observasi merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan yang dilaksanakan dengan cara mengamati data dengan secara langsung keadaan serta menganalisis berbagai kejadian *real* di lapangan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan data-data yang valid mengenai *commitment to the process* pada *collaborative governance* dalam Program DASHAT di Desa Surengede. Penulis mendapatkan informasi-informasi yang cukup lengkap dengan mengobservasi komitmen dari para *stakeholder* terkait

Observasi yang dilakukan oleh penulis dapat direalisasikan dengan cara mencatat berupa informasi yang berhubungan dengan peran aktor dalam proses *commitment to the process* dalam Program DASHAT di Desa Surengede.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen atau berkas-berkas resmi para *stakeholder*. Di dalam penelitian ini, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Program DASHAT di Desa Surengede.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dapat diartikan sebagai langkah pengolahan data menjadi bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam menganalisis data, langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu langkah dalam analisis data dengan cara mereduksi atau merangkum hasil-hasil penelitian dan data-data yang telah dikumpulkan dengan memfokuskan pada hal-hal yang krusial. Peneliti memilah dan menyederhanakan data yang telah diperoleh dari lapangan agar menghasilkan kesimpulan mengenai *commitment to the process stakeholder* terkait dalam Program DASHAT di Desa Surengede

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Data dapat disajikan dalam bentuk kalimat, skema atau gambar, dan tabel. Proses penyajian data hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait dilakukan dengan penyusunan transkrip wawancara dalam setiap gejala

sehingga dapat memberikan gambaran alamiah penelitian yang bersumber dari wawancara asli informan.

c) Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam menganalisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Verifikasi ini bertujuan untuk menghasilkan hasil atau kesimpulan akhir yang nantinya digunakan Penulis sebagai hasil akhir penelitian. Hasil temuan akhir dalam penelitian ini berkaitan dengan *commitment to the process* para *stakeholder* dalam Program DASHAT di Desa Surengede.

1.9.8 Kualitas Data

Standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif harus diterapkan untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber data untuk menguji keabsahan yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber pemerintah yang mencakup DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, pihak TANGKAS, kader penggerak Desa Surengede, penyuluh lapangan KB Desa Surengede, dan tim penggerak PKK Desa Surengede. Lebih jauh, peneliti memastikan validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi di lapangan dengan cara observasi dan juga dokumentasi